

## ABSTRAK

Lelang di Indonesia masih merupakan suatu kegiatan yang jarang dipergunakan secara sukarela oleh masyarakat. Orang berpandangan negatif tentang lelang disebabkan mereka mempunyai pemikiran bahwa lelang selalu berkaitan dengan eksekusi Pengadilan, walaupun dalam kenyataannya hal itu tidak dapat dipungkiri karena sebagian besar lelang dilaksanakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam berperkara. Baru-baru ini telah diberlakukan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang berisi tentang pengaturan lelang terhadap aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan, namun mempunyai kondisi khusus tertentu (tidak seperti biasa). Inti dari peraturan dimaksud adalah bahwa terhadap aset berupa benda sitaan, barang rampasan, benda sita eksekusi yang mempunyai “kondisi khusus” tertentu (dokumen pendukung tidak ada, terdapat perbedaan data objek, amar putusan tidak jelas dan berkas putusan hilang) tetap dapat diajukan lelangnya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Akibat hukum dari penerbitan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dalam pelaksanaan lelang terhadap barang atau sitaan adalah berpindahnya kewenangan dan tanggung jawab pelelangan dari Pejabat Lelang Kelas I kepada Kepala Kejaksaan sebagai pembuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Lelang eksekusi barang rampasan negara atau sitaan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan tetap dapat dilaksanakan walaupun dokumennya tidak lengkap dan terdapat perbedaan data baik data yang tercantum di dalam putusan pengadilan. Perlindungan hukum pemenang lelang apabila terdapat kesalahan dokumen lelang barang rampasan atau sitaan adalah terdapat dua perlindungan hukum yang diatur yakni Perlindungan Hukum secara Represif yang dapat ditemukan dalam Pasal 4 PMK Pelaksanaan Lelang, pelaksanaan lelang dan hasilnya tidak dapat dibatalkan serta harus segera dilaksanakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan lelang dengan menerbitkan SPTJM harus ditindak lanjuti dengan mengaturnya dalam Standar Operasional atau Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan agar tidak terjadi kekosongan hukum serta adanya kepastian hukum. Kepastian hukum pembeli lelang perlu perhatian khusus karena tidak jarang permasalahan yang timbul dalam persyaratan lelang yang dokumennya tidak lengkap. Kurangnya peraturan terkait perlindungan hukum pemenang lelang menjadi salah satu faktor timbulnya permasalahan. Sehingga perlu untuk membuat peraturan baru yang khusus mengatur mengenai perlindungan hukum pemenang lelang tersendiri.

***Kata Kunci : Lelang, SPTJM, Kejaksaan, Barang Sitaan***

## ABSTRACT

Auctions in Indonesia are still an activity that is rarely used voluntarily by the community. People have a negative view of auctions because they think that the auction is always related to the execution of the Court, even though in reality this cannot be denied because most auctions are carried out as a follow-up to the execution of the court against the losing party in the case. Recently, the Attorney General's Regulation Number PER-002 / A / JA / 05/2017 has been enacted concerning Auctions and Direct Sales of Confiscated Objects or State Seized Goods or Executed Confiscated Objects which contain auction arrangements for assets under the authority of the Prosecutor's Office, but has certain special conditions (unusual). The essence of the regulation is that assets in the form of confiscated objects, seized goods, confiscated objects for execution that have certain "special conditions" (no supporting documents, there are differences in object data, unclear verdict documents and missing decision files) can still be submitted to the auction. State Property and Auction Service Office.

The legal consequence of the issuance of a statement of absolute responsibility in carrying out an auction of goods or confiscation is the transfer of authority and responsibility for the auction from the Class I Auction Officer to the Head of the Prosecutor's Office as the author of the Statement of Absolute Liability. The auction to execute state booty or confiscated goods carried out by the Prosecutor can still be carried out even though the documents are incomplete and there are differences in the data, both the data contained in the court decision. Legal protection for auction winners if there is an error in the documents for auction of confiscated or confiscated goods is that there are two regulated legal protections, namely Repressive Legal Protection which can be found in Article 4 PMK Implementation of Auctions, the implementation of the auction and the results cannot be canceled and must be implemented immediately as regulated in the regulation legislation. In conducting the auction by issuing SPTJM, a follow-up must be followed by regulating it in the Operational Standard or Decree issued by the Head of the Prosecutor's Office so that there is no legal vacuum and legal certainty. The legal certainty of auction buyers needs special attention because it is not uncommon for problems that arise in auction requirements that are incomplete. The lack of regulations related to legal protection for auction winners is one of the factors that arise. So it is necessary to make new regulations that specifically regulate the legal protection of individual auction winners.

Keywords: *Auction, SPTJM, Attorney General's Office, Confiscated Goods*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini terdapat hambatan yang penulis hadapi, akan tetapi berkat dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak, maka tesis ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan baik. Pada kesempatan ini, dengan rasa syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua Penulis (alm) Hari Agus dan Ibu Ir.Suharnik dan Pakde H. Eko Suhartono selaku wali saya atas dukungan dalam hal apapun serta doa selama penulis menempuh Pendidikan di Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Saudara kandung penulis Heny Purwati Ningsih S.P, dan dr. Puspa Ningrum serta Calon Suami Ari Ersanditama S.Pn yang memberikan dukungan serta semangat selama penulis menempuh Pendidikan di Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Sahabat Tercinta, Ricky Bima Sanjaya S.H., M.Kn.,Intan latiana S.H.,M.kn., Berlian Permatasari S.H., Enis sukrawati S.H.,fedora arya pramtya S.H.,Marsya audinary.,S.H, Wahyu feby Wicaksono.S.H dan Dicky
4. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H.Selaku Dosen Pembimbing Satu dan Bapak **Taufik** Rachman, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dosen

Pembimbing dua yang telah membantu dalam memberikan ide dan saran kepada penulis terkait tesis ini.

5. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H selaku Ketua Penguji, Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H, M.H. selaku Penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi lebih baiknya dalam penulisan pada tesis ini
6. Para Pimpinan, Dosen, dan Ketua serta Staff Program Studi Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga .
7. Sahabat dan teman-teman Himpunan Mahasiswa Magister Kenotariatan yang telah membantu mengisi hari-hari selama melaksanakan pembelajaran di Universitas Airlangga.

Surabaya, 23 November 2020

Ayu Ratnasari. S.H.